

Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Timur Melalui Penguatan Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah (TP UKS/M)

Ferdian Putra Dwi Hardiansyah¹, Indira Arundinasari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*ferdianputra99@gmail.com*¹

ABSTRACT

Indonesia is facing serious issues regarding nutrition, particularly evident in the high number of cases of malnutrition among toddlers and similar problems experienced by school-age children, both boys and girls, a condition referred to as *stunting*. Micro data analysis (Riskesdas 2013) reveals that East Java Province is ranked 15th among all provinces in Indonesia with a prevalence rate of 35.7% for *stunting*. Referring to Presidential Regulation Number 72 of 2021, the East Java Provincial Government is striving to expedite the reduction of *stunting*, especially within the scope of schools or madrasahs. The East Java Provincial Government has issued Governor's Decree No. 188/330/KPTS/013/2022 concerning the School or Madrasah Health Enterprise Development Team in East Java Province. Therefore, the People's Welfare Bureau of East Java Province, as a facilitator in the basic healthcare sector, plays a role in accelerating the reduction of *stunting* through the School or Madrasah Health Enterprise Development Team in East Java. This study adopts a qualitative approach using the descriptive analysis method by Miles and Huberman's model. The research utilizes primary data obtained through interviews, observations, group discussions, as well as secondary data collected through literature review. The findings indicate that the People's Welfare Bureau of East Java Province is pivotal in addressing the reduction of *stunting* through the School or Madrasah Health Enterprise Development Team, which has become the focus of the East Java Provincial Government's actions. Collaborating with relevant stakeholders in tackling the acceleration of *stunting* reduction through the School or Madrasah Health Enterprise Development Team can aid in achieving the target percentage of *stunting* situations in East Java, reducing to 13.5% by 2024. Through the School or Madrasah Health Enterprise Development Team, it is hoped that the People's Welfare Bureau can actively contribute to the success of the government's program regarding the national movement to prevent and reduce *stunting*.

Keywords: Collaborative governance, *stunting*, role

ABSTRAK

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait gizi, terutama terlihat dari tingginya angka kasus gizi kurang pada anak balita dan masalah serupa yang juga dialami oleh anak usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan hal ini yang disebut dengan *stunting*. Hasil olah data mikro (Riskesdas 2013) Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan prevalensi *stunting* di urutan nomor 15 seluruh provinsi di Indonesia dengan prevalensi yaitu sebesar 35,7%. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 maka, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mempercepat penurunan *stunting* khususnya di lingkup sekolah atau madrasah. Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur No 188/330/KPTS/013/2022 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah Provinsi Jawa Timur. Sehingga Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dalam bidang pelayanan dasar sub subtransi kesehatan memiliki peran dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui TP UKS/M di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif model miles dan huberman. Data yang digunakan ialah data primer yang diambil melalui wawancara, observasi, dan *forum group discussion* serta data sekunder yang diambil melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur bahwasanya penurunan *stunting* melalui TP UKS/M menjadi fokus

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertindak. Dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menangani percepatan penurunan stunting melalui TP UKS/M dapat membantu tercapainya target presentase situasi stunting Jawa Timur menjadi 13,5% pada tahun 2024 mendatang. Lewat UKS/M diharapkan Biro Kesra dapat berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah tentang gerakan nasional mencegah dan menekan angka *stunting*.

Kata kunci: *Collaborative governance, stunting, peran*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan serius terkait gizi, yang sangat terlihat dari tingginya jumlah kasus gizi kurang pada anak balita serta tantangan serupa yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kekurangan gizi saat masa sekolah tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi penyebab tingginya tingkat absensi dan angka putus sekolah. Permasalahan ini tidak hanya memiliki dampak segera, melainkan juga konsekuensi jangka panjang yang menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan status gizi hingga tahun 2025, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Stunting, atau pertumbuhan terhambat, merujuk pada kondisi seseorang yang memiliki tinggi badan (TB) yang tidak sesuai dengan seharusnya untuk usianya. Penilaian ini didasarkan pada perhitungan skor Z-indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Seseorang dianggap mengalami *stunting* ketika skor Z-indeks TB/U-nya berada di bawah -2 SD (standar deviasi). Kejadian *stunting* sebagian besar disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya, serta adanya tingkat kesakitan yang tinggi, atau bahkan merupakan gabungan dari keduanya. Fenomena ini umumnya terjadi di negara-negara dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. *Stunting* dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan implikasi jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas di masa depan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016)

Pada tahun 2018 Kemenkes RI kembali melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) mencatat prevalensi *stunting* nasional mencapai 30,8 persen, meningkat dari tahun 2013 (37,2%). Prevalensi *stunting* di Indonesia mencerminkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, angka *stunting* di Indonesia mencapai persentase yang lebih signifikan daripada Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%). Peringkat Indonesia sebagai peringkat kelima dunia untuk jumlah anak yang mengalami *stunting* menunjukkan dampak serius dari masalah gizi ini di tingkat global. Lebih mencemaskan lagi, lebih dari sepertiga anak yang berusia di bawah lima tahun di Indonesia mengalami *stunting*, menyiratkan bahwa tingkat tersebut jauh di bawah rata-rata yang diharapkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Urgensi penanganan masalah gizi ini menjadi semakin penting untuk memastikan generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Khususnya di provinsi Jawa Timur menurut Survei

Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), Target dan Capaian Prevalensi Stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020. Kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Jatim menjadi 13,5% pada tahun 2024 mendatang.

Stunting, yang merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Dampak dari *stunting* tidak hanya bersifat jangka pendek, seperti gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolik, dan terhambatnya perkembangan otak dan kecerdasan, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang. Anak yang mengalami *stunting* berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif, kesulitan belajar, sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga rentan terhadap penyakit, serta berpotensi memiliki tinggi badan yang tidak optimal serta produktivitas yang rendah di masa dewasa (WHO, 2005). Oleh karena itu, bukan hanya merupakan ancaman kesehatan pada tingkat individual, tetapi juga menjadi ancaman serius dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada sumber daya manusia berkualitas. Upaya pencegahan *stunting* dan penanganannya menjadi kunci utama dalam memastikan generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang optimal, serta mampu bersaing dan berkontribusi di kancah global.

Hasil olah data mikro (Riskesdas 2013) Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan prevalensi stunting di urutan nomor 15 seluruh provinsi di Indonesia dengan prevalensi yaitu sebesar 35,7% tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengambil langkah dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur selaku penunjang pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah memiliki berbagai strategi untuk percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Strategi tersebut yakni pembentukan serta penguatan Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M).

Tim Pembina UKS/M atau TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. Adapun tujuannya adalah pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah sehat. Serta mensosialisasikan pentingnya kesehatan di lingkungan sekolah atau madrasah. Tim pembina UKS/M juga berkoordinasi dengan lembaga-lembanga kesehatan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan adanya TP UKS/M ini pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi kesehatan di sekolah/madrasah khususnya masalah stunting. Sebagai respons terhadap hal ini, Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Gubernur No 188/330/KPTS/013/2022 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kerangka salah satu strategi penanggulangan *stunting*, Biro Keajahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur memainkan peran kunci dalam upaya percepatan penurunan kasus *stunting* di wilayah tersebut. Biro Keajahteraan Rakyat merupakan entitas yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dan tugas serta fungsinya telah diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Biro Keajahteraan Rakyat Jawa Timur memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Tugas ini melibatkan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor, seperti bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Dengan demikian, Biro Keajahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penanggung jawab dalam memastikan keselarasan dan keberlanjutan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya konkret untuk mengatasi prevalensi *stunting* di Jawa Timur

Pada bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar terdapat sub subtansi didalamnya yaitu sosial, kesehatan, dan pendidikan. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam bidang pelayanan dasar sub subtansi kesehatan memiliki peran dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Jawa Timur yaitu pada strategi pertama yang di adopsi dari strategi Bappeda Jawa Timur yaitu menurunkan beban pengeluaran. Sehingga Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur mengambil langkah untuk melaksanakan program-program serta pengoordinasian dengan stakeholder lainnya guna mencapai tujuan dengan optimal. Dalam konteks Administrasi Publik konsep kolaborasi atau kerja bersama sebagaimana di gambarkan di atas sering disebut sebagai *collaborative governance*.

Collaborative governance, seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) dalam Islamy (2018), merupakan upaya untuk menggabungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik dari sektor publik maupun swasta dalam suatu wadah kolektif dengan lembaga-lembaga pemerintah guna berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Agbodzakey (2011) menjelaskan bahwa istilah "*collaborative*" lebih menekankan pada pendekatan berdiskusi dan orientasi menuju kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Menurut pandangan Ansell dan Gash (2008) yang dikutip oleh Emerson (2011), terdapat pergeseran dalam tatanan pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir. Terlihat adanya pola baru dalam pemerintahan yang muncul untuk menggantikan berbagai cara tradisional dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Pola baru tersebut dikenal sebagai *collaborative governance*. Pola ini ditandai dengan keterlibatan pihak-pihak swasta, publik, dan masyarakat secara bersama-sama dalam suatu forum kolektif dengan badan-badan pemerintah untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Seperti yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Jawa Timur, dengan mengadakan sebuah Forum Grup Discussion (FGD) yang mendatangkan narasumber terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, BAPPEDA, dan OPD lainnya di provinsi maupun kabupaten atau kota se Jawa Timur.

Perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju pada kemajuan, terutama dalam aspek kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup demi mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan Masyarakat dibidang kesehatan dapat diaktualisasikan dari kepedulian pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat. Sehingga, masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatannya agar dapat sadar akan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat akan lebih tepat sasaran apabila dilakukan sesuai dengan kondisi kultur masyarakat yang hendak diberdayakan. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur mensosialisasikan kesehatan di mulai dari lingkup sekolah dengan harapan kondisi kultur masyarakat yang utama selain di rumah adalah sekolah/madrasah.

Menurut Sondang P. Siagian (2009:132) menguraikan bahwa peran pemerintah dapat dikenali dalam berbagai wujud, membentuk fondasi utama bagi fungsi-fungsi penting dalam administrasi pembangunan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pengaturan, perumusan kebijaksanaan, pelayanan, penegakan hukum, serta pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya bersifat monolitik tetapi mencakup serangkaian tindakan yang beragam untuk menopang keberlanjutan dan kemajuan Masyarakat. Menurut Nyoman Sumaryadi (2010:21), peran pemerintah menjadi kunci dalam menjamin keamanan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan utama yang membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan harmoni sosial.

Berdasarkan uraian diatas, Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* menegaskan prioritas tindakan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI), yang meliputi pendampingan keluarga dengan risiko *stunting*, pendampingan calon pengantin atau Pasangan Usia Subur (PUS), serta pengawasan terhadap keluarga yang berpotensi mengalami *stunting*. Visi Indonesia untuk menjadi generasi emas pada tahun 2045 menjadi sebuah impian yang menjadikan penekanan pada keberhasilan negara dalam memanfaatkan bonus demografi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang terwujud dalam individu yang sehat, cerdas, kreatif, dan kompetitif secara global. Namun, salah satu rintangan utama dalam merealisasikan impian ini adalah prevalensi *stunting* di kalangan anak Indonesia. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan membahas peran biro kesejahteraan rakyat provinsi Jawa Timur dalam upaya penurunan *stunting* di provinsi Jawa Timur melalui penguatan TP UKS/M.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder guna untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi secara menyeluruh mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur pada bagian pelayanan dasar sub bagian kesehatan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.

Penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, informan yang dipilih ialah yang memenuhi kriteria dan pernah berperan dalam proses penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, fokus grup, wawancara, dan studi kepustakaan. Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aksi dan Strategi Biro Kesejahteraan Rakyat Dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Timur

Dalam memecahkan suatu permasalahan tentu diperlukannya strategi untuk dapat mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai pengentasan kemiskinan maka diperlukannya strategi dalam mengambil keputusan yang nantinya akan menjadi kebijakan. Pengambilan kebijakan yang bijak dan implementasi yang efektif merupakan kunci dalam penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka *stunting* sebesar 19,20, dari total angka *stunting* nasional sebesar 21,60. Meskipun secara nasional berada di peringkat ke-9, provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius dengan adanya beberapa kabupaten atau kota yang memiliki angka *stunting* yang tinggi. Kondisi ini menjadi fokus perhatian pemerintah karena berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan generasi muda di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah mengacu pada Perpres No 72 tahun 2021 yang menggariskan percepatan penurunan *stunting*, didukung dengan peraturan bersama dari empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia No 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah.

Sebagai respons terhadap hal ini, Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Gubernur No 188/330/KPTS/013/2022 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah di Provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam upaya penanganan masalah *stunting* dengan melibatkan berbagai instansi terkait dan membentuk tim khusus untuk mengatasi situasi tersebut.



Gambar 1 Situasi *Stunting* di Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Adapula dua program dari 10 program prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu skrining anemia, dan konsumsi TTD Remaja Putri. Dengan hal tersebut bahwasanya penurunan *stunting* melalui TP UKS/M menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertindak. Pada tahun 2023 target dan capaian prevalensi *stunting* Di Jawa Timur menurun menjadi 16% disbanding pada tahun 2022 yang masih berada pada 18,4% dengan laju penurunan *stunting* 3,4% pertahunnya diharapkan *stunting* di Jawa Timur sedikit demi sedikit dapat menurun.

Selain itu, program Implementasi Aksi bergizi dalam trias UKS/M Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 3 aksi yaitu pendidikan kesehatan tentang penyuluhan pada Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan melalui Muatan local (kesenian Daerah), pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tentang penjangkaran kesehatan dalam pemeriksaan berkala dan pemberian TTD pada remaja putri (SMP dan Sma Sederajat), kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat. TP UKS/M juga melakukan penjangkaran kesehatan dengan penilaian riwayat dan pemeriksaan kesehatan yang ditunjukkan pada seluruh peserta didik baru di tahun ajaran baru baik sekolah negeri, swasta, maupun Madrasah. Dengan melakukan kesehatan berkala dengan pelaksanaan minimal 1 tahun sekali dengan berkoordinasi dengan Puskesmas terdiri dari tenaga dokter, perawat, dan kesehatan gigi dengan dibantu oleh guru atau pendamping dan kader kesehatan. Adapun kegiatan tersebut memiliki tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah dan remaja secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar dan terdeteksinya secara dini masalah kesehatan anak sehingga dapat segera ditindak lanjuti.

Kolaborasi Biro Kesejahteraan Rakyat Dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Timur

Dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Provinsi Jawa Timur, diperlukan kolaborasi yang optimal antara berbagai pemangku kepentingan terkait. Konvergensi, sebagai suatu tindakan yang terintegrasi dan saling terhubung antar program-program, baik yang terkait dengan pembangunan infrastruktur kesehatan maupun program-program pemberdayaan kesehatan dan pendidikan masyarakat, menjadi sangat penting. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 secara rinci menguraikan bahwa dalam mengatasi masalah kesehatan *stunting*, terdapat 11 intervensi khusus yang harus dijalankan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengadopsi kebijakan yang berkesinambungan dalam menangani *stunting* dengan memperkuat program TP UKS/M di kabupaten atau kota di wilayah tersebut. Program ini bertujuan sebagai sarana pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Sebanyak 38 kabupaten atau kota telah melaksanakan program aksibergizi yang melibatkan 582 sekolah dan madrasah yang secara teratur menjalankan program ini. Peran perangkat kesehatan seperti puskesmas dan guru pendamping menjadi lebih aktif dalam mempromosikan kesehatan dan langkah-langkah pencegahan untuk menjamin kesehatan, terutama dalam mengurangi angka *stunting*. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan upaya pencegahan *stunting*, melalui kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan serta penguatan program-program kesehatan di berbagai tingkatan di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Daerah telah mengajak berbagai pihak yang terlibat untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengakselerasi penanggulangan *stunting*. Dinas Pendidikan di seluruh provinsi Jawa Timur telah memainkan peran proaktif dalam mendukung pemerintah, terutama dalam menggalang kerja sama antar sekolah dan madrasah dengan berbagai sektor terkait kesehatan. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada kerjasama dengan puskesmas, melainkan juga melibatkan rumah sakit dan dinas kesehatan di berbagai Kabupaten di wilayah provinsi tersebut. Di samping itu, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur turut serta aktif dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dengan meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik dan lingkungan sekolah atau madrasah. Dinas Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja serta membangun kemitraan dan jaringan dengan semua sekolah atau madrasah serta sektor-sektor terkait lainnya.

Tujuan utama dari program ini adalah membangun kerja sama dalam upaya pencegahan *stunting* di tingkat kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selain itu, program ini mendorong kabupaten dan kota untuk membuat database kesehatan dan strategi penanggulangan *stunting* yang berbasis pada data terpadu. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kokoh dan strategi yang terarah dalam menangani masalah *stunting* di berbagai wilayah di Jawa Timur. Keterlibatan berbagai stakeholder yang telah diuraikan sebelumnya menjadi landasan penting dalam upaya penanggulangan *stunting*. Proses dialog yang terjalin

antara aktor-aktor tersebut memegang peranan krusial, diiringi dengan kebutuhan membangun komitmen bersama guna mencapai hasil yang optimal. Setiap stakeholder, dengan sumber daya dan pemahaman yang berbeda, menjadi elemen kunci dalam menyusun strategi dan menjalankan program pencegahan *stunting*. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah daerah, sebagai aktor utama dalam proses kolaborasi, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Keterbukaan ini menciptakan dasar kepercayaan di antara pemerintah dan masyarakat, yang esensial untuk kelancaran pelaksanaan program pencegahan *stunting*. Inisiatif seperti Rembuk *Stunting* yang digagas pemerintah menjadi forum yang memungkinkan penyampaian gagasan dan ide dari berbagai pihak, membuka ruang partisipasi aktif dalam upaya mengatasi permasalahan *stunting*.

Komunikasi publik menjadi instrumen vital dalam seluruh agenda, mulai dari penyusunan rencana hingga pelaksanaan program. Melalui komunikasi yang efektif, dapat tumbuh komitmen dan kepercayaan antar stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi. Namun, terdapat keterbatasan dalam pengetahuan dan keterlibatan dari berbagai stakeholder, sebagaimana tercermin dalam tabel yang dikumpulkan oleh peneliti. Hal ini menyoroti bahwa persoalan *stunting* belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang cukup dari stakeholder di luar lingkup pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Keterlibatan lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat akan memperkuat kolaborasi, menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan *stunting* secara menyeluruh.

Dengan adanya kolaborasi dalam menangani percepatan penurunan *stunting* melalui TP UKS/M dapat mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di sekolah atau madrasah. Kolaborasi ini juga bermanfaat untuk saling berbagi tentang program yang dilaksanakan selama ini atau sebagai bahan evaluasi termasuk kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan. Adanya kolaborasi penanggulangan percepatan penurunan *stunting* melalui TP UKS/M ini juga dapat membantu tercapainya target presentase situasi *stunting* Jawa Timur dengan laju penurunan *stunting* 3,4% per tahun nya serta dengan harapan presentasi *stunting* di tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023.



Gambar 2 Rapat Kerja Daerah Mengenai TP UKS/M Tahun 2023 Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Penulis, 24 Oktober 2023

Maka dari itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari lembaga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut berperan dalam upaya penurunan *stunting* dengan pengutan TP UKS/M Jawa Timur. Peran dari biro kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur ialah sebagai fasilitator untuk menyediakan tempat serta menghubungi narasumber dan audiens untuk dapat menyalurkan informasi secara efektif. Pada tanggal 24 Oktober 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur mengadakan sebuah Forum Grup Discussion (FGD) yang mendatangkan narasumber terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, BAPPEDA, dan OPD lainnya di provinsi maupun kabupaten atau kota se Jawa Timur. FGD tersebut membahas tentang rencana aksi penanganan penurunan *stunting* melalui TP UKS/M di Jawa Timur.

Kolaborasi forum untuk menurunkan angka *stunting* melalui program TP UKS/M di Jawa Timur menggariskan beberapa poin kunci yang memiliki signifikansi. Salah satunya adalah upaya revitalisasi tim Pembina UKS/M, dengan tujuan menghidupkan kembali kegiatan UKS/M di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota hingga kecamatan. Program UKS/M, yang dikenal dengan Tias UKS/M, merangkul aspek pendidikan, kesehatan, layanan kesehatan, serta upaya pembinaan lingkungan sekolah untuk membentuk pola perilaku yang mendorong anak-anak menjalani kehidupan bersih dan sehat.

Harapan utama dari program UKS/M adalah peran aktifnya dalam mendukung keberhasilan program pemerintah yang bertujuan mencegah dan menurunkan angka *stunting* secara nasional. Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait di tingkat kabupaten atau kota diminta untuk turut serta aktif dalam melaksanakan dan membiayai kegiatan terkait UKS/M. Pemetaan yang tepat diperlukan dalam upaya pembinaan di satuan pendidikan, sementara penyusunan program kerja TP UKS/M di setiap kabupaten atau kota menjadi langkah strategis lainnya. Selain itu, peningkatan kerjasama lintas sektor (seperti DINKES, DIKNAS, KEMENAG, KESRA, BNN, PMI, PKK, CSR/dunia usaha) merupakan aspek penting yang harus diperkuat. Kolaborasi antar sektor tersebut menjadi landasan kuat dalam mendukung implementasi program penurunan *stunting* melalui TP UKS/M di Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyoroti pentingnya peran yang dimainkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam upaya penurunan *stunting* melalui penguatan Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) melalui acuan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. *Stunting*, sebagai masalah serius dalam pertumbuhan anak, telah menjadi fokus utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi implementasi program penurunan *stunting* dengan memperkuat TP UKS/M. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, sekolah, dan komunitas, menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program ini. Penguatan TP UKS/M dilakukan melalui berbagai

strategi, seperti dua program dari 10 program prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu skrining anemia, dan konsumsi TTD Remaja Putri. Dengan hal tersebut bahwasanya penurunan *stunting* melalui TP UKS/M menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertindak. Pada tahun 2023 target dan capaian prevalensi *stunting* di Jawa Timur menurun menjadi 16% dibanding pada tahun 2022 yang masih berada pada 18,4% dengan laju penurunan *stunting* 3,4% pertahunnya diharapkan *stunting* di Jawa Timur sedikit demi sedikit dapat menurun. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak menjadi fondasi penting untuk keberhasilan dan kelangsungan program ini.

Kesimpulannya, artikel ini menggarisbawahi peran penting Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam mendukung upaya penurunan *stunting* melalui penguatan TP UKS/M. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi masalah *stunting* serta perlunya pendekatan holistik dalam memastikan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 24 Oktober 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur mengadakan sebuah Forum Grup Discussion (FGD) yang mendatangkan narasumber terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, BAPPEDA, dan OPD lainnya di lingkup provinsi maupun kabupaten atau kota se Jawa Timur. FGD tersebut membahas tentang rencana aksi penanganan penurunan *stunting* melalui TP UKS/M di Jawa Timur. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa peran Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator dan fasilitator memiliki dampak yang positif dalam memperbaiki kondisi kesehatan anak dan meningkatkan kualitas hidup terutama di lingkup sekolah atau madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Razali, M. T., & Wana, I. S. L. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, 3(2), 703-722.
- Bima, A. (2019). Analisis Bagaimana Mengatasi Permasalahan Stunting Di Indonesia? *Jurnal Kedokteran*, 35(4), 60.
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98-104. <https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.124>
- Evalia Nuranita Putri, H. N. (2022). Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1-13.
- Himawati, E. H., & Fitria, L. (2020). Hubungan Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Sampang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.1-5>
- Kabupaten, D. I., Provinsi, M., & Tenggara, N. (2022). DYNAMIC GOVERNANCE DALAM MENGATASI STUNTING DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI

- NUSA TENGGARA TIMUR Bernadino. Asdaf Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, 2022, 1-18.
- Latifa, S. N. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173-179.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(02), 74-83.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225-229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rahmawati, S. A. (2023). Strategi Program Peningkatan Gizi Sebagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(4), 3107-3117. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- Renyoet, B. S., Martianto, D., Sukandar, D., Masyarakat, D. G., & Manusia, F. E. (2016). POTENSI KERUGIAN EKONOMI KARENA STUNTING PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013 (Economic losses potential due to stunting in toddlers in Indonesia year 2013). *Jurnal Gizi Pangan*, 11(3), 247-254. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan>
- Saeful, A., Sri Ramdhayanti, D., & Tinggi Agama Islam Binamadani, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE, 3, 1-17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80-95. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/40/47>
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>